

## MANAJEMEN PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT PERBATASAN DI KALIMANTAN BARAT

Mujiono

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Indonesia  
[masmuji@hotmail.com](mailto:masmuji@hotmail.com)

### ABSTRACT

*The aim of this case study for build nationality commitment through political education, and the results that their cultural background border community profile, and the contains of the connections across the border communities that can not be avoided. the process of life together in the territory of each country. The relationship clumps ethnic tribes share a common culture are interrelated. Political education to revive awareness through the study of national and state political education that emphasizes obligation of citizens to establish intensive communication with the government's public relations border with instilling a sense of bigotry tot the nation and the state. Border communities need balance the needs living standards through economic infrastructure, and needs improving the well-being by providing facilities that can trigger a more dynamic economic activity, in order to participation formaintain the territorial integrity through national unity political, economic, social and cultur approach.*

**Keywords:** borders, political education, national commitment.

### ABSTRAK

**Studi** kasus ini bertujuan untuk membangun komitmen kebangsaan melalui pendidikan politik, dan hasil bahwa latar belakang budaya mereka profil masyarakat perbatasan, dan berisi tentang hubungan masyarakat perbatasan yang tidak dapat dihindari. proses kehidupan bersama di wilayah masing-masing negara. Hubungan rumpun suku-suku suku memiliki kesamaan budaya yang saling terkait. Pendidikan politik untuk membangkitkan kesadaran melalui kajian pendidikan politik berbangsa dan bernegara yang menekankan kewajiban warga negara untuk menjalin komunikasi yang intensif dengan humas perbatasan pemerintah dengan menanamkan rasa fanatisme terhadap bangsa dan negara. Masyarakat perbatasan perlu menyeimbangkan kebutuhan taraf hidup melalui infrastruktur ekonomi, dan kebutuhan peningkatan kesejahteraan dengan menyediakan fasilitas yang dapat memicu kegiatan ekonomi yang lebih dinamis, dalam rangka partisipasi untuk menjaga keutuhan wilayah melalui pendekatan kesatuan politik, ekonomi, sosial dan budaya.

**Kata Kunci:** perbatasan, pendidikan politik, komitmen nasional.

### PENDAHULUAN

Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pendidikan politik lebih menekankan pada proses kegiatan kehidupan warga negara, dan pendidikan politik tidak akan efektif apabila tanpa dilandasi dengan politik pendidikan, sebagai strategi pendidikan politik pemerintah dalam menyelenggarakan

pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi penekanannya politik pendidikan terletak pada kebijakan pemerintah terhadap pendidikan masyarakat agar memahami arti politik dalam berbangsa dan bernegara.

Di Kalimantan Barat wilayah yang langsung berbatasan dengan Serawak Malaysia Timur membentang sepanjang 966 kilometer, mempunyai luas sekitar 2,1 juta hektar. Secara administratif meliputi 5 wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu dengan 15 Kecamatan dan 98 Desa (Paparasi Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012). Kondisi geografis dan Topografi wilayah perbatasan Kalimantan Barat yang masih terisolir, disebabkan karena keterbatasan prasarana jalan, transportasi darat, sungai serta fasilitas publik lainnya. Kondisi ini berdampak pada kondisi kesejahteraan sosial, ekonomi, pendidikan dan *skill* masyarakat daerah perbatasan yang masih tertinggal dibanding dengan masyarakat daerah Malaysia.

Masyarakat perbatasan Indonesia Malaysia dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi cenderung ke Serawak (Malaysia), karena akses yang mudah serta ketersediaannya fasilitas yang lebih baik. Kawasan perbatasan terdapat sekitar 50 jalur jalan setapak yang menghubungkan 55 desa di Kalimantan Barat dengan 32 kampung di Serawak, lebih 60% penduduk masyarakat Puring Kencana juga memiliki KTP Malaysia dan termasuk Surat Peranak (Akte Kelahiran), hal ini dikarenakan mereka lebih senang mendapatkan akte kelahiran dari Pemerintah Malaysia.

Realitas yang memprihatinkan ini disebabkan kondisi daerah yang pembangunannya terbelakang dan terisolir (indikator daerah tertinggal dan aksesibilitas rendah). Penduduk dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi cenderung ke Serawak, bahkan masyarakat di kedua perbatasan menggunakan alat ukur (mata uang) yang digunakan lebih dominan ringgit dari pada rupiah. Hal ini karena akses yang mudah serta ketersediaan fasilitas yang lebih baik (menjadi interland Serawak). Ketergantungan perekonomian masyarakat perbatasan hampir pada semua barang dan jasa, serta tempat menjual hasil bumi masyarakat di wilayah Malaysia.

Kesenjangan kehidupan yang terjadi di daerah perbatasan tersebut banyak dipengaruhi oleh ketimpangan infrastruktur dan fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah RI, contohnya seperti harga kebutuhan pokok yang sangat mahal, masyarakat lebih memilih masuk ke wilayah Malaysia untuk memenuhi kebutuhannya. Dapat dibayangkan bahwa harga semen 1 juta rupiah per sak, bensin 25 ribu rupiah per liter, sementara di negara tetangga, lebih murah, di Aruk, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, warga bergantung pada pasokan listrik dari Malaysia. Jalan aspal di kawasan itu juga dibangun oleh kontraktor Malaysia.

Dalam kasus di atas rasa kebangsaan dan nasionalisme dari masyarakat perbatasan bisa dikatakan telah tergadaikan, masyarakat Indonesia di wilayah perbatasan lebih memilih diakui sebagai masyarakat Malaysia. Bagaimana mungkin rasa nasionalisme itu bisa terbangun jika kualitas hidup secara ekonomi rendah. Apalagi dengan gaji yang ditawarkan cukup menggiurkan. Rasa nasionalisme bisa kalah hanya karena kebutuhan untuk bertahan hidup kondisi ini seolah-olah memberikan pembenaran bahwa nasionalisme bangsa ini mulai redup. Apalagi warga diperbatasan yang pendidikannya minim. Faktor ini tidak akan menjadi hal yang tidak masuk akal jika kasusnya yang terjadi di Kalimantan Barat seperti itu,

masyarakat mana yang akan menolak jika diperhatikan seperti itu dan ditambah lagi dengan kekurangan perhatian dari pemerintah sendiri.

Berangkat dari kondisi dan solusi sebagaimana dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang membangun kembali komitmen kebangsaan, melalui pendidikan politik masyarakat perbatasan, khususnya di Kalimantan Barat.

Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pendidikan politik masyarakat perbatasan di Kalimantan Barat. Akan memiliki kegunaan baik bagi peneliti sendiri, partai politik, pemerintah daerah dan pemerintah pusat atau *stakeholders* yang lain.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hal ini dimaksudkan agar permasalahan yang dijadikan fokus akan dikaji lebih mendalam, lebih holistik sehingga akan mampu melihat kondisi nyata pendidikan politik masyarakat perbatasan di Kalimantan Barat. Melalui pendekatan tersebut, peneliti ingin memperoleh data berdasarkan situasi peneliti yang wajar tanpa ada upaya manipulasi.

Sudjana dan Ibrahim mengungkapkan lima ciri pokok penelitian kualitatif, yaitu: (1) penelitian kualitatif menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data langsung; (2) penelitian kualitatif sifatnya deskriptif analitik; (3) penekanan penelitian kualitatif ada pada proses bukan pada hasil; (4) penelitian kualitatif sifatnya individual dan (5) penelitian kualitatif mengutamakan makna (Nana Sudjana dan R Ibrahim, 1989).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti memandang penelitian kualitatif dengan pendekatan multi kasus dalam permasalahan ini tepat, agar dapat memahami secara mendalam pendidikan politik masyarakat perbatasan di Kalimantan Barat. Rancangan Awal Penelitian : 1). Studi Pendahuluan 2). Prosedur memperkuat validitasi pengumpulan data dan temuan penelitian 3). Struktur unit pengumpulan data 4). Konsep dan teori 4). Penyusunan riset protokol

Penelitian dengan pendekatan kualitatif, teknik analisa data dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data. Sedikitnya ada tiga prosedur analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang dilakukan secara interaktif, yaitu: *Pertama*, reduksi data (*data reduction*), *Kedua*, penyajian data (*data display*), *Ketiga*, *Conclusion Drawing/Verivication*. Untuk menguji keabsahan data kualitatif dapat dilakukan melalui strategi tertentu, yaitu: (1) *Triangulation*; (2) *Member check*; (3) *Long-term observation*; (4) *Peer examintaion*, i; (5) *Participatory or collaborative modes of research*; (6) *Researcher's biases*; (7) Analisis kasus negatif; (8) *Thick deskription*; (9) *Auditing*, (reliabilitas) (Moleong, 2002). Dalam kaitannya dengan studi ini, peneliti menggunakan tiga teknik dalam pengumpulan data untuk menjamin keabsahan data, yaitu: 1) *Triangulation*. 2). *Member check*. 3). *Long-term observation*.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kabupaten Sambas**

Hasil dari jawaban pertanyaan-pertanyaan Penelitian dalam profil kultur daerah perbatasan di Kabupaten Sambas dari proses transmigrasi dari suku Jawa, suku Sunda, suku Madura, suku Bugis yang bercampur dengan suku Melayu Sambas lokal, dan bersentuhan dengan warga Malaysia Serawak suku Melayu Melanau dengan pengembangan keyakinan yang berbeda-beda Islam, Kristen dengan mata pencaharian tani dan nelayan.

### **Kabupaten Bengkayang**

Hasil dari jawaban pertanyaan-pertanyaan Penelitian dalam profil kultur daerah perbatasan di Kabupaten Bengkayang mayoritas suku dayak jagoi satu keturunan jagoi babang, jagoi kindong, jagoi sejano, jagoi belida, dan jagoi sake, suku dayak tersebut dari suku dayak Malaysia yang menyebar berladang di desa-desa berkumpul dengan suku dayak asli bekatik tabaro, bekatik telayo, bekatik sango, bekatik arak sebagai sub-rumpun dayak bidayuh di Kabupaten Bengkayang.

### **Kabupaten Sanggau**

Hasil dari jawaban pertanyaan-pertanyaan Penelitian dalam profil kultur daerah perbatasan di Kabupaten Sanggau masyarakatnya sudah heterogen sekalipun mayoritas masyarakatnya adalah suku dayak bidayuh. Maraknya transaksi perdagangan lintas batas baik yang legal maupun ilegal karena banyak memiliki akses langsung ke negara Bagian Sarawak, Malaysia.

### **Kabupaten Sintang**

Hasil dari jawaban pertanyaan-pertanyaan Penelitian dalam profil kultur daerah perbatasan di Kabupaten Sintang bahwa mayoritas masyarakat adalah suku dayak Bukau yang memiliki karakter ladang berpindah-pindah namun saat ini sudah banyak pendatang-pendatang dari luar yang hidup berdampingan dengan suku Bakau untuk membangun Kabupaten Sintang.

### **Kabupaten Kapuas Hulu**

Hasil dari jawaban pertanyaan-pertanyaan Penelitian dalam profil kultur daerah perbatasan di Kabupaten Kapuas Hulu mayoritas penduduknya dari suku dayak Iban.

#### **Pendidikan Politik Masyarakat Perbatasan**

##### **Di Semua Kabupaten Masyarakat Perbatasan**

Secara umum bahwa hasil dari jawaban pertanyaan-pertanyaan Penelitian dalam pendidikan politik masyarakat daerah perbatasan di semua Kabupaten: Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu dalam dinamika politiknya hampir sama.

#### **Kondisi dan Peran lembaga politik khususnya Partai Politik Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Perbatasan**

Pendidikan politik oleh partai demokrat tidak dapat menyentuh masyarakat perbatasan karena keterbatasan biaya. Namun demikian pendidikan politik dilakukan secara berkala walau tidak secara keseluruhan sampai ke tingkat yang lebih rendah. Pendidikan politik dilakukan dengan melibatkan para caleg DPR RI, DPR Provinsi dan DPRD Kab/Kota yang berada di Dapil masing-masing dengan didampingi yang mengetahui masalah politik. Namun demikian menurut Rasmidi pendidikan politik yang dilakukan dinilai efektif.

#### **Fungsi Dan Kewajiban Sosial lembaga politik khususnya Partai Politik**

Menurut Syarif Abdullah Alkadrie (*Ketua DPW Partai NasDem Kalimantan Barat, jawaban Angket*), fungsi Partai Politik sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik mempunyai fungsi untuk melaksanakan pendidikan dengan menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran atas

hak dan kewajiban politik rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; menyerap, menyalurkan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam pembuatan kebijakan Negara melalui mekanisme badan-badan permusyawaratan/perwakilan rakyat; serta mempersiapkan anggota masyarakat untuk mengisi jabatan-jabatan politik sesuai dengan mekanisme demokrasi.

### **Pendidikan Politik Untuk Mendukung Komitmen Kebangsaan Masyarakat Perbatasan Di Kalimantan Barat.**

Komitmen Kebangsaan bagi masyarakat perbatasan cukup bagus dan mereka tetap Warga Negara Indonesia dan mereka juga ikut sebagai Kader Partai yang dapat dipilih dan memilih sesuai dengan hak dan kewajiban mereka sebagai Warga Negara Indonesia. Karena dengan adanya pendidikan politik mereka sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka sebagai masyarakat Indonesia, dan tinggal stakeholders yang menyikapi mereka dengan arif dan bijaksana terhadap hak-hak mereka untuk mengimplementasikan pendidikan politik yang mereka ketahui.

### **Latar Profil Kultur Masyarakat Daerah Perbatasan**

Secara umum masyarakat di perbatasan Kalimantan Barat dengan negara bagian Sarawak adalah suku dayak dengan sub suku yang mendiami diantaranya suku dayak bekatik di kecamatan Sajingan Kabupaten Sambas, dayak jagoi di kecamatan Jagoi Babang dan kecamatan siding Kabupaten Bengkayang, dayak bidayuh di kecamatan Entikong dan kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau, dayak Bukau di kecamatan Ketungau Hulu dan kecamatan Ketungau Hilir kabupaten Sintang dan dayak Iban di Kecamatan Badau, Kecamatan Embaloh Hulu, Kecamatan Batang Lupar dan Kecamatan Hulu Kapuas kabupaten Kapuas Hulu.

Daerah perbatasan merupakan daerah yang selalu dibayangi-bayangi permasalahan infiltrasi pengaruh unsur budaya asing. Kondisi demikian bisa terjadi karena masyarakat daerah perbatasan Indonesia dapat berhubungan langsung dengan luar negeri/negara tetangga, baik melalui jalan darat maupun jalan laut terutama dalam bidang perdagangan. Lalu lintas perdagangan yang dilakukan masyarakat perbatasan Indonesia dengan negara tetangga telah berlangsung dalam rentang waktu yang cukup panjang. Kondisi sangat mempengaruhi dalam terbentuknya dinamika sosial budaya yang terjadi di daerah perbatasan tersebut. Dalam konteks perdagangan itulah, intensitas hubungan terjadi. Di samping menjual hasil dagangannya, antar mereka saling membina hubungan. Dengan demikian secara sengaja atau tidak sengaja antar mereka dapat saling bertukar informasi akan berbagai hal. Dalam konteks demikian pengaruh unsur-unsur budaya negara tetangga itu akan mudah masuk.

Kesenjangan kondisi di perbatasan menyebabkan terjadinya pergerakan arus manusia antarnegara. Hal ini menjadi perhatian penting dalam hubungan internasional, karena terjadinya migrasi di wilayah perbatasan disebabkan oleh motif peningkatan kesempatan ekonomi antara perusahaan dan individual. Kondisi tersebut berdampak pada perluasan jaringan sosial antara negara yang berbeda, sehingga membentuk komunitas transnasional dengan ciri etnis dan warisan budaya yang sama, namun hidup dalam negara yang berbeda.

Akaha, T. and Anna, V. *Crossing National Borders: Human Migration Issues in Northeast Asia*. Japan: United Nations University Press. 2005: 3)

### **Dinamika Politik Masyarakat Perbatasan;**

**Dinamika** politik masyarakat adalah suatu keadaan masyarakat yang selalu bergerak atau berkembang dan dapat menyesuaikan diri dalam interaksi antara masyarakat dengan pemerintah untuk memperjuangkan aspirasinya dalam mencapai tujuan tertentu. Dinamika politik masyarakat perbatasan secara nyata saat ini dapat dilihat dengan tingginya antusiasme masyarakat dalam menyambut pemekaraan Kabupaten Sekayam Raya sebagai daerah otonomi baru pecah dari Kabupaten Sanggau, pemekaran Kabupaten Banua Lanjak dan Kabupaten Sentarum sebagai daerah otonomi baru pecah dari Kabupaten Kapuas Hulu, pemekaran Kabupaten Ketungau sebagai daerah otonomi baru pecah dari Kabupaten Sintang, pemekaran kabupaten Sambas Utara sebagai daerah otonomi baru pecah dari Kabupaten Sambas.

### **Kondisi dan Peran lembaga politik khususnya Partai Politik Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Perbatasan**

Peran Partai Politik dalam pendidikan politik sangat besar, misalnya dalam konteks Pemilu, rakyat atau pemilih merupakan subjek sesungguhnya dalam pemilihan umum, karena itu pemilu dapat dianggap sebagai proses menghimpun suara rakyat untuk menentukan pemerintahan yang konstitusional secara demokratis. Disamping itu suara rakyat juga merupakan bagian dari legitimasi sosial terhadap kekuasaan.

Kemampuan Partai Politik dalam memberikan pendidikan politik dapat dilihat dengan tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu serta sebaran kepengurusan partai politik ditingkat kecamatan dan kelurahan/desa.

Faktor yang mempengaruhi Partai NasDem dalam memberikan pendidikan politik adalah faktor sosial budaya masyarakat setempat serta kultur budaya mereka yang sudah turun temurun sehingga kerjasama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama serta tokoh adat juga memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pemahaman pendidikan politik kepada mereka. Sedangkan Partai Demokrat memiliki kepengurusan sampai ke desa yang disebut pengurus ranting. Sementara peran partai politik dalam pendidikan politik bertujuan agar masyarakat paham dalam menyalurkan hak politiknya dan juga sekaligus mensosialisasikan kinerja partai.

Pendidikan politik oleh partai demokrat tidak dapat menyentuh masyarakat perbatasan karena keterbatasan biaya. Namun demikian pendidikan politik dilakukan secara berkala walau tidak secara keseluruhan sampai ketinggian yang lebih rendah. Pendidikan politik dilakukan dengan melibatkan para caleg DPR RI, DPR Provinsi dan DPRD Kab/Kota yang berada di Dapil masing-masing.

### **Fungsi Dan Kewajiban Sosial lembaga politik khususnya Partai Politik**

Sebagai Partai Politik yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, tentunya fungsi dan kewajiban sosial sangat penting untuk dilaksanakan, bukan hanya didaerah perbatasan saja tetapi di seluruh wilayah Negara Indonesia karena dalam konteks Pemilu setiap suara pemilih sangat berarti untuk menentukan kekuasaan di masa yang akan datang.

Cerminan partai politik saat ini dikawasan perbatasan bukan hanya menjadi tanggung jawab semata dari Partai Politik tersebut tetapi tanggung jawab seluruh stakeholders yang mengelola Negara yang kita cintai ini, sehingga dengan kebersamaan kita sebagai komponen anak bangsa, kita yakin komitmen kebangsaan yang ada didalam hati saudara-saudara kita yang ada dikawasan perbatasan akan sama dengan komitmen kebangsaan saudara-saudara kita yang berada bukan dikawasan perbatasan.

Perkembangan fungsi dan kewajiban sosial partai politik berjalan cukup baik, namun yang menjadi hambatan adalah terkait SDM dan biaya. Karena partai demokrat merasa itu kewajiban pemerintah saja sehingga tidak saling membantu dan hanya akan muncul pada saat pilkada maupun pemilu saja.

### **Pendidikan Politik Untuk Mendukung Komitmen Kebangsaan Masyarakat Perbatasan Di Kalimantan Barat.**

Salah satu tujuan pendidikan politik adalah untuk meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Kesemua hal tersebut dimaksudkan untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila. Parpol merupakan pilar demokrasi yang juga mempunyai fungsi sebagai penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi rakyat sekaligus sebagai alat perjuangan rakyat untuk mencapai kemakmuran dan keadilan. Selain itu, parpol juga berfungsi sebagai sarana partisipasi politik dan rekrutmen politik.

Berbeda dengan desa-desa di kecamatan Puring Kencana menurut Jangu (*Kepala desa Sebindang, wawancara pada tanggal 21 Juni 2013*) saat ini di masyarakat di desanya lebih banyak bekerja di perkebunan sawit yang ada di desanya, demikian juga sangat sedikit anak-anak usia sekolah yang bersekolah di Lubuk Antu, Sarawak. Walaupun sebenarnya banyak warga desa Sebindang memiliki hubungan kekerabatan yang cukup dekat dengan warga Lubuk Antu. Mustopa (*Tokoh Masyarakat Kecamatan Badau, wawancara pada tanggal 20 Juni 2013*) menambahkan bahwa hingga saat ini masih banyak anak-anak di kecamatan badau yang memiliki Surat Peranakan (Akte Kelahiran) dari Malaysia.

Menurut Gani (*Tokoh Pemuda Kecamatan Badau, wawancara pada tanggal 20 Juni 2013*) "Nasionalisme dipebatasan itu nihil. Nasionalisme ketergantungan, jadi nasionalisme di perbatasan itu sudah hilang dimakan oleh ketergantungan ekonomi di seberang. Bagaimana mungkin kita ingin membangun nasionalisme selagi kesejahteraan belum diprioritaskan, coba sekarang ini kalau tahun 2000-an dulu kalau gak salah, di perbatasan ini. Masyarakat kita tidak bisa lepas begitu saja dari Malaysia selama perbatasan ini tidak memiliki akses terhadap 3 hal yakni pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Contohnya kenapa orang-orang banyak yang melahirkan disana. Jadi sambil orang itu bertukar, rela bertukar warga negara karena mau jadi warga negara Malaysia itu mahal.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Masyarakat di daerah perbatasan Kalimantan Barat dan Sarawak (Malaysia) sebagian besar memiliki akar budaya yang sama, bahkan masyarakat di kedua kawasan tersebut banyak

yang memiliki hubungan darah/kekerabatan. Kesenjangan kondisi social ekonomi antara masyarakat di daerah perbatasan menyebabkan tingginya interaksi antar masyarakat di kedua kawasan baik melalui jalur resmi maupun yang tidak resmi.

2. Keberadaan partai politik di daerah perbatasan sudah sampai pada kepengurusan tingkat terendah (Desa). Namun demikian kehadiran partai politik hanya dirasakan oleh masyarakat ketika menjelang pemilu. Selain pada masa-masa itu masyarakat tidak merasakan adanya partai politik, demikian juga dengan keberadaan kepengurusan partai di tingkat Desa dan Kecamatan yang aktif hanya pada momen pemilu.
3. Dinamika politik masyarakat perbatasan tidak begitu bergejolak, dan tidak terlalu terpengaruh dengan situasi politik di pusat maupun daerah, namun tingkat kerawanan perlu diwaspadai terhadap intervensi pengaruh-pengaruh asing yang akan mengancam stabilitas keamanan di masyarakat
4. Kemampuan Partai Politik dalam memberikan pendidikan politik dapat dilihat dengan tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu serta sebaran kepengurusan partai politik ditingkat kecamatan dan kelurahan/desa. Peran partai politik dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat perbatasan lebih pada kepentingan pengumpulan suara pada saat pemilu sehingga pendidikan politik yang diberikan hanya pada penyampaian visi, misi dan program partai semata. Selain itu rendahnya Sumber Daya Manusia, minimnya infrastruktur dan pendanaan menjadi hambatan tersendiri bagi partai politik untuk melaksanakan pendidikan politik
5. Perkembangan fungsi dan kewajiban sosial partai politik berjalan cukup baik, namun yang menjadi hambatan adalah terkait SDM dan biaya. Karena partai merasa itu kewajiban pemerintah saja sehingga tidak saling membantu dan partai hanya akan muncul pada saat pilkada maupun pemilu saja.
6. Sinergi program antara partai politik dengan pemerintah dilakukan dalam bentuk menetapkan peraturan pemerintah (PP) berkenaan dengan kebijakan pendidikan, kesehatan, pertanian, industri, hukum, dan ekonomi termasuk insfratruktur. Sehingga dengan bersinergi dalam pelaksanaan program partai politik yakni antara eksekutif/pemerintah dan legislative/wakil rakyat yang saling mendukung dalam misi mensejahterakan masyarakat perbatasan.
7. Pendidikan Politik dimasyarakat secara umum mulai sedikit berkembang dalam wacana publik namun belum menjadi suatu kajian akademik terfokus, dan belum menyentuh aspek-aspek substantif. Pendidikan politik oleh Partai Politik yang ada dikawasan perbatasan belum dilakukan secara terprogram, sistimatis, kontinu dan lebih cenderung bermuara kepada kepentingan politik. Sementara itu mengenai komitmen kebangsaan masyarakat perbatasan saat ini masih dihadapkan pada kondisi kesenjangan infrastruktur dengan masyarakat di Negara tetangga.

## **SARAN**

1. Direkomendasikan kepada Partai politik perlu terus meningkatkan peran, fungsi dan kewajibannya sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dengan meningkatkan kehadiran partai politik di daerah perbatasan secara kontinyu dan terjadwal serta terus mengaktifkan kerja kepengurusan sampai pada tingkatan terendah

dengan kegiatan-kegiatan yang mendatangkan manfaat pada masyarakat guna memperkuat komitmen kebangsaan masyarakat di perbatasan.

2. Direkomendasikan kepada Pemerintah daerah perlu menginisiasi untuk mensinergikan program pendidikan politik yang dilaksanakan dengan program serupa yang dilaksanakan oleh partai politik dengan menjalin koordinasi dan memberikan dukungan kepada partai politik yang memiliki program pendidikan politik bagi masyarakat di daerah perbatasan. Pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan harus dilakukan secara simultan dengan upaya peningkatan komitmen kebangsaan masyarakat di daerah perbatasan.
3. Direkomendasikan kepada para peneliti yang lain yang tertarik untuk meneliti mengenai masyarakat di daerah perbatasan di Kalimantan Barat untuk meneliti lebih dalam mengenai upaya peningkatan komitmen kebangsaan masyarakat di kawasan perbatasan.

### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Peneliti patut kiranya menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang menjadi partner diskusi peneliti dalam penyelesaian artikel ini, khususnya ucapan terima kasih kepada

1. Prof Dr. Thamrin Abdulah, M.Pd, MM sebagai Promotor yang banyak membantu dalam penyelesaian disertasi ini
2. Prof. Dr. R. Madhakomala, sebagai Co-Promotor yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing dan memberikan masukan, dalam menyelesaikan Disertasi ini.
3. Prof. Dr. Djaali sebagai Rektor UNJ yang memberikan peluang untuk melanjutkan pendidikan di Program Sekolah Pascasarjana UNJ
4. Prof. Dr. Moch. Asmawi, M.Pd Direktur Sekolah Pascasarjana UNJ yang memberikan kesempatan masuk program Doktor Pascasarjana UNJ

### **DAFTAR PUSTAKA**

- A. Sartono Kartoditjo, 1995, Negara dan nasionalisme Indonesia, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Yogyakarta,
- Aelenei, V. 2001. "Dreptul frontierei de stat", Bucharest, vol. I, Pro Transilvania Publishing House,
- Akaha, T. and Anna, V. (eds). 2005. Crossing National Borders: Human Migration Issues in Northeast Asia. Japan: United Nations University Press.
- B.N. Marbun, 2002, Kamus Politik, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,
- Benedict Anderson 1983, Introduction Course Collection : Module HIIH-244,
- Budimansyah, 2008, PKN dan Masyarakat Multikultural, Sekolah Pascasarjana UI, Jakarta,
- Center for Civic Education, 1994, National standards for civics and government, Center for Civic Education.
- Cogan, J.J. (1999). Developing the Civic Society: The Role of Civic Education. Bandung: CICED.
- Endang Sumantri, 2008, Pendidikan Politik, Universitas Terbuka, Jakarta,
- Gabriel Abraham Almond, 2002, Ventures in Political Science: Narratives and Reflections, Lienne Rienne Publisher Inc, London,
- Giddens, A. 1985. The Nation-state and Violence. Vol. 2 of Contemporary History of Historical Materialism. Cambridge: Polity Press.

- Giroux, H. A. 2005. *Border Crossings, Cultural Workers and the Politics of Education*, Great Britain: Routledge.
- Guo, R. 2005. *Cross Border Resource Management, Theory and Practice*. Amsterdam: Elsevier.
- Hadi, 1995. *Metodologi Research*. Jilid III. Yogyakarta : Andi,
- Hans Kohn, 1984, *Nasionalisme Arti dan sejarahnya*, Erlangga, Surabaya,
- House, J. W. 1980. "The Frontier Zone: A Conceptual Problem for Policy Makers." *International Political Science Review* 1(4):
- Miriam Budiardjo, 2004, *Dasar-Dasar ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Moleong, Levey. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya,
- Nana Saodih Sukmadinata, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. (Bandung: Rosada Karya)
- Nana Sudjana dan R Ibrahim. *Metodologi Penelitian*.(Bandung:1989).
- Nasution. 1996. *Metode Penelitian Sosiologis Naturalistik Kuantitatif*. Bandung : Tarsito.
- Paparan Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012.